

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi yang sudah berjalan lebih dari satu dasa warsa di Indonesia telah merambah hampir keseluruhan aspek kehidupan. Salah satu aspek reformasi yang dominan adalah aspek pemerintahan dan aspek pemerintahan yang dimaksud adalah hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada aspek ini, isu yang mencuat adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas dan nyata yang diberikan kepada daerah (pemerintah daerah), khususnya pada tingkat kabupaten/kota.

Laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan bukan untuk mempersulit dan membingungkan pembacanya tetapi justru untuk membantu mereka dalam membuat keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil bisa lebih berkualitas. Laporan keuangan publikasian tidak lebih seperti berita atau informasi di media masa, sehingga membaca laporan keuangan pada dasarnya tidaklah lebih sulit membandingkan membaca berita-berita lain (Mahmudi, 2010: 1).

Penyajian laporan keuangan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban secara tertulis atas kinerja keuangan yang telah dicapai. Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Dengan demikian ketiadaan Laporan keuangan menunjukkan lemahnya akuntabilitas. Lemahnya akuntabilitas menunjukkan lemahnya sistem yang berimbas pada membudayanya berbagai penyelewengan seperti korupsi yang sistemik. Oleh Karen itu untuk mengurangi tingkat penyelewengan yang

kerap terjadi di instansi sektor publik, salah satu cara adalah dengan cara membudayakan prinsip akuntabilitas yang berate bahwa pengelolaan keuangan pemerintah harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan yang dianggarkan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar (Mahmudi 2010 : 10).

Informasi laporan keuangan akan berkolerasi dengan kualitas laporan keuangan itu sendiri jika publik melihat itu (laporan keuangan) tidak hanya dari segi formalitas, tetapi juga dari segi substansinya. Dengan memperhatikan pentingnya kualitas laporan keuangan merupakan salah bentuk berjalanya kebijakan yang telah dibuat. kualitas laporan keuangan akan menjadi baik apabila terlaksananya pelaporan keuangan yang berdasarkan standar akuntansi (Mahmudi 2010: 10).

Laporan keuangan akan tersusun dengan baik jika pengelolaan keuangan yang baik membuat setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara finansial. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban pegawai pemerintah kepada publik yang menjadi konsumen pelayanannya. Dengan pengertian yang lebih luas, akuntabilitas berarti pelayanan kepada publik dan pertanggungjawaban kepada publik (Halim dan Iqbal, 2012 : 23).

Pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean*

*government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan sistem pengendalian intern yang baik agar terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, Mulyadi (2001: 163) mengemukakan bahwa proses pengendalian intern merupakan aspek penting dari sistem informasi akuntansi. Proses pengendalian intern mengidentifikasi tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi tersebut. Pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua metode serta prosedur yang berkaitan terutama dengan data akuntansi, dan berhubungan langsung dengan pengamanan terhadap kekayaan perusahaan dan keandalan catatan keuangan. Dengan demikian pengendalian intern tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasi secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer.

Tujuan sistem pengendalian intern yaitu menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya sistem pengendalian intern tersebut dapat dibagi menjadi dua macam: pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*) dan pengendalian intern administrasi (*intern administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi

metode dan ukuran-ukuran dan koordinasikan terutama menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi (Mulyadi 2001 : 163).

Keberhasilan semua organisasi baik besar maupun kecil bukan semata-mata ditentukan oleh sumber daya alam tersedia. Akan tetapi banyak ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang berperan merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan organisasi yang bersangkutan (Manullang 2008: 195). Setiap organisasi tentunya mempunyai berbagai tujuan yang hendak dicapainya. Tujuan tersebut diraih dengan mendayagunakan sumber-sumber dayanya yang ada. Kendatipun berbagai sumber daya yang ada penting bagi organisasi, salah satunya faktor yang menunjukkan keunggulan kompetitif potensial adalah sumber daya manusia dan bagaimana sumber daya manusia dikelola (Simamora 2006: 3).

Sumber daya manusia menjadi elemen penting untuk suatu organisasi perusahaan ataupun pemerintahan. Sumber daya manusia yang unggul serta profesional dalam sebuah organisasi mutlak dipelukan dan sangat dibutuhkan untuk menunjang suatu kegiatan yang ada dalam pemerintahan. Kompetensi sumber daya manusia salah satu indikator adalah pengalaman kerja yang lama dalam bidang tertentu yang sudah di tekuninya atau jabatan pekerjaan yang pernah didudukinya. Pengalaman pegawai/karyawan dalam bekerja akan memberikan kemampuan bagi pegawai/karyawan tersebut terutama kemampuan dalam menjabarkan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya yang terdapat di dalam struktur organisasi dan standar operasional prosedur yang ada. Selanjutnya tugas pokok dan fungsi organisasi yang ada dijabarkan dalam kerja

sama kelembagaan kemampuan melaksanakan tugas kelembagaan itu sendiri, Charolina, dkk (2013).

Pengalaman kerja yang dimiliki staf bagian keuangan/akuntansi akan mempermudah dalam melakukan pekerjaan karena dengan pengalaman kerja profesional tersebut maka staf bagian keuangan/akuntansi lebih mengerti dan cekatan dalam menyusun laporan keuangan. Pengalaman kerja profesional dalam bidang akuntansi akan lebih memudahkan dan ketelitian dalam proses penyusunan laporan keuangan Muzahid (2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Akuntansi bahwa Permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan keuangan daerah di DPPKAD Kota Gorontalo ialah sumber daya manusianya yang belum sempurna/memadai untuk mengelola keuangan dibutuhkan kepelatihan bimbingan teknologi (BIMTEK) karena penyajian laporan keuangan akan mengikuti struktur sesuai kepelatihan tersebut demi tercapainya kualitas laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 BPK RI memberikan opini "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP). BPK berpendapat informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah cukup andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Disamping laporan opini, BPK-RI juga menerbitkan Laporan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
2. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

Atas temuan-temuan tersebut BPK RI telah memberikan rekomendasi yang secara rinci terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern tersebut di atas. Sumber: [www.gorontalo.bpk.go.id](http://www.gorontalo.bpk.go.id)

Dewi dan Himba (2014), tingkat efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) di pemerintah kota Denpasar secara keseluruhan termasuk dalam kriteria efektif (KE) serta berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian Yesni, dkk (2014), hasil pengujian menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten Singingi. Sedangkan menurut Sutawan dkk (2015), sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian Putra dan Maski (2013), hasil penelitian menunjukkan pengalaman kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Maulia (2014), hasil penelitian menunjukkan pengalaman dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Charolina, dkk (2013) tentang pengaruh implementasi pengelolaan keuangan dan pengalaman kerja terhadap kualitas laporan keuangan dengan hasil penelitian implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan dan pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. tetapi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, peneliti menambahkan satu variabel yaitu sistem

pengendalian intern. Keunggulan penelitian ini dengan menambahkan satu variabel sistem pengendalian intern karena kualitas laporan keuangan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya suatu sistem yang mendukung. Sistem yang dimaksud yaitu sistem pengendalian intern yang juga mengarah pada pengelolaan keuangan untuk tercapainya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pencapaian keandalan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Implementasi Pengelolaan keuangan, Sistem Pengendalian Intern, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

1. Sumber daya manusianya yang belum sempurna/memadai untuk mengelola keuangan daerah dibutuhkan kepelatihan bimbingan teknologi (BIMTEK) karena penyajian laporan keuangan akan mengikuti struktur sesuai kepelatihan tersebut.
2. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2014 BPK RI memberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). BPK berpendapat informasi yang terkandung dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah cukup andal untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.
3. Disamping laporan opini, BPK-RI juga menerbitkan Laporan Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan. Beberapa temuan signifikan terkait dengan kepatuhan terhadap

peraturan perundangan yang berlaku dan sistem pengendalian intern yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Belum Dilandasi Peraturan Daerah;
- b. Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Keluar Daerah.

### **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengelolaan keuangan (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan pengalaman kerja (X3) berpengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan (Y).
2. Apakah pengelolaan keuangan (X1), sistem pengendalian intern (X2) dan pengalaman kerja (X3) berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan (Y).

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengalaman kerja berpengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengalaman kerja berpengaruh simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

## **1.5 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yaitu :

### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan penelitian.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kota Gorontalo dalam hal implementasi pengelolaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengalaman kerja dalam menghasilkan laporan keuangan.